

Politik dan Perempuan

(Studi Tentang Partisipasi Politik Mahasiswi Dalam Organisasi Intra Kampus di Universitas Negeri Surabaya)

Achmad Kautsar

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

puccakautsar@gmail.com

Ali Imron

Dosen S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

aimron8883@gmail.com

Abstrak

Gerakan-gerakan sosial yang melibatkan perempuan hal ini membuktikan bahwa perempuan dapat menunjukkan jati diri dan eksistensi dalam sektor publik seperti dalam berpolitik. Partisipasi dan representasi politik perempuan jelas merupakan bentuk perjuangan dan usaha secara kemanusiaan agar semua manusia, baik perempuan, laki-laki, dari semua etnis golongan, ras, agama, bangsa, dan negara dapat merasakan dan memperoleh sesuatu yang dicapai, yaitu hak-hak kemanusiaan serta gerakan yang dilakukan perempuan berkaitan dengan proses demokrasi. Tingkat partisipasi mahasiswipada organisasi kemahasiswaan tidak lebih dari 20% dari jumlah seluruh aktivis organisasi yang ada. Dari persentase tersebut, mahasiswi hanya menduduki posisi kurang strategis, seperti wakil bendahara, bidang kewanitaan, atau seksi konsumsi dan administrasi jika dalam kepanitiaan. Hanya sebagian kecil yang berada ditampuk kepemimpinan yang tertinggi dalam struktur organisasi. latar belakang partisipasi politik mahasiswi mempunyai motif keinginan sendiri, dorongan atau dukungan, dan mobilisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan Subjek dalam penelitian ini yang dipilih dengan cara *purposive*. Bentuk partisipasi politik mahasiswi terbagi dalam tiga masa yaitu pra kepemimpinan, saat memimpin, dan pasca kepemimpinan yang tergolong dalam tipologi partisipan, subjek, parokial.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Mahasiswi, Tipologi

Abstract

Social movements involving women are proving that women can show the identity and existence in the public sector as in the politicking. Participation and political representation of women is clearly a form of struggle and effort for humanity to all people, whether male, female, ethnic groups, semua of race, religion, nation, and State can feel and get something accomplished, namely the rights of humanity and the movement that made women were associated with the process of democracy. The level of participation in the Organization of Student Affairs student at no more than 20% of the total number of existing organization aktivis. The percentage of the Sorority, only less strategic positions, such as Deputy Treasurer, fields or sexy femininity, consumption and administration if in the Committee. Only a small fraction are given the highest leadership in the structure of the organization. background and political participation have a motive the desire itself Sorority, encouragement or support, and mobilization. This research uses qualitative research methods and Subjects in this study were selected by means of *purposive*. Forms of political participation student divided into three periods, namely the pre's leadership, as the lead, and after the leadership belongs to the typology of participants, subject, parochial.

Keywords: Political Participation, Female Student, Typology

*) Terima kasih kepada Pambudi Handoyo selaku mitra bestari yang telah mereview dan memberimasukan berharga terhadap naskah ini.

Pendahuluan

Budaya patriarki memposisikan bahwa kaum laki-laki berada pada posisi paling atas, sedangkan perempuan berada pada posisi dibawah laki-laki. Budaya seperti ini pada akhirnya memunculkan *stereotype-stereotype* yang mendomestikasi perempuan, akibatnya perempuan mengalami marginalisasi, dan subordinasi dengan kaum laki-laki. Indonesia memiliki budaya patriarki yang mengatakan bahwa perempuan itu seharusnya tidak bekerja di sektor publik tapi hanya di sektor domestik. Karena tugas perempuan adalah menjadi seorang yang bertanggung jawab di rumah atau menjadi ibu rumah tangga bahkan ada anggapan bahwa perempuan pada dasarnya adalah “ratu rumah tangga”, karena itu untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya harus bekerja di dapur juga (Budiman,1985:49)

Upaya dalam menghapus ketidakadilan gender di masyarakat baik dalam bentuk kekerasan serta diskriminasi terus dilakukan namun upaya yang dilakukan belum bisa mengubah kondisi ketidakadilan gender di masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan yang bekerja pada sektor publik. Gender adalah sifat yang sangat melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang secara langsung dikonstruksi secara sosial maupun secara kultural. Konstruksi ini menurut Mansour Fakih (1999:17) melahirkan perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), yang lebih banyak merugikan perempuan. Perbedaan gender ini sudah dibentuk, dikonstruksi, disosialisasi serta diperkuat secara kultural melalui proses yang sangat panjang dan hal ini dianggap sebagai kodrati dari Tuhan yang tidak akan mungkin bisa diubah lagi, hal ini diteruskan oleh masyarakat yang membentuk suatu nilai-nilai dan semakin memperkuat bahwa sifat-sifat yang sudah dilekatkan pada perempuan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dan laki-laki adalah kaum yang kuat dianggap sebagai kodrat yang harus diterima semenjak lahir.

Telah ada gerakan-gerakan sosial yang melibatkan perempuan hal ini membuktikan bahwa perempuan dapat menunjukkan jati diri dan eksistensi dalam sektor publik seperti dalam berpolitik. Lebih dari dua puluh lima tahun setelah Konferensi Dunia Pertama Perempuan di Meksiko

Kegiatan lebih dari dua puluh tahun dengan slogan “Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW), kesetaraan gender telah menandai politik di semua negara (Wijaksana,2004:38) Partisipasi dan representasi politik perempuan jelas merupakan bentuk perjuangan dan usaha secara kemanusiaan agar semua manusia, baik perempuan, laki-laki, dari semua etnis golongan, ras, agama, bangsa, dan negara dapat merasakan dan memperoleh sesuatu yang dicapai, yaitu hak-hak kemanusiaan serta gerakan yang dilakukan perempuan berkaitan dengan proses demokrasi.

Bahkan di Indonesia sendiri sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Regulasi tersebut menjamin hak-hak politik perempuan turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, menjadi subjek dalam implementasi dalam perumusan kebijakan, berhak untuk menjadi pejabat dan pemimpin organisasi publik dan pemerintahan di segala tingkat, dan berserikat kedalam perkumpulan-perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan politik negara (Wijaksana,2001:15).

Pasca berakhirnya kepemimpinan presiden Megawati Soekarno Putri yang menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada pemilu tahun 2004 presentase daftar caleg perempuan yang terpilih pada pemilu 2004 meningkat bahkan melebihi kuota perempuan di parlemen yang semula 8.8% menjadi 11% pada pemilu 2004 (Wijaksana,2004:45)

Penelitian Rizky Hani (2009:89-93) tentang “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilu Kades Tahun 2009: Studi Kasus di Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang”. Pemilu Kades secara langsung dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pembajakan otoritas dari rakyat oleh para wakil lembaga perwakilan masyarakat. Hal ini terjadi karena di alam pemilihan secara langsung rakyat bisa menentukan pemimpin-pemimpin yang mereka kehendaki secara otonom. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran bukan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan

masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Sedangkan penelitian Anik Farida (2006:51-56) tentang “Partisipasi Politik Perempuan Pesantren di DPRD Jombang”. Penelitian ini menghasilkan temuan menarik bahwa pandangan perempuan adalah “nomor dua” telah berimplikasi pada lemahnya pendidikan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Pengaruh kuatnya budaya patriarki hingga saat ini menjadi batasan dalam keterlibatan dalam dunia publik, khususnya pada peran perempuan dalam partisipasi politik. Posisi perempuan yang termarginalkan, tersubordinasi, dan stereotipe yang mengarah pada domestikasi perempuan. Pada masa sekarang perempuan menginginkan aktualisasi dalam dirinya belum diakui oleh kebanyakan masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam politik mengundang banyak kontroversi, khususnya perempuan pesantren dengan lingkungan norma agama yang kuat telah dikonstruksi bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin.

Selanjutnya penelitian Roby Djamitra (2012:49-55) tentang “Partisipasi Politik Masyarakat Samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro”. Partisipasi politik masyarakat Samin dilatarbelakangi perubahan masyarakat Samin yang semakin berkembang. Pola pikir yang semakin berkembang dan memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan serta mulai terbuka dengan hal-hal baru dari luar, seperti inovasi tentang teknologi dan arus informasi yang semakin berkembang di masyarakat Samin, tetapi tidak menyimpang dari ajaran ajaran saminitisme yang ada pada diri mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Samin apabila dilihat dengan piramida hirarki partisipasi politik hanya berkisar pada tiga posisi bawah, yaitu “partisipasi diskusi informal” untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi dan yang memiliki jabatan di pemerintahan, “voting” atau hanya memberikan hak suara untuk masyarakat pada umumnya dan juga cenderung pada “apatis” atau tidak ikut campur tangan dalam politik.

Akhir-akhir ini, peran dan partisipasi aktif mahasiswa dalam organisasi intra

kampus sudah mulai mengemuka. Di Unesa misalnya, pada jajaran struktural organisasi intra kampus sudah ada mahasiswa yang namanya tercantum pada posisi inti. Meskipun secara persentasenya masih kalah bila dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki. Di Unesa organisasi intra kampus didominasi oleh mahasiswa laki-laki dan sangat minim partisipasi yang dilakukan oleh mahasiswa perempuan. Mahasiswa perempuan jarang terlihat menduduki posisi strategis, seperti ketua atau sekjen (wakil). Mahasiswa perempuan hanya cenderung berada di posisi anggota semisal anggota yang membawahi salah satu kementerian atau hanya sebagai bendahara atau sebagai sekretaris.

Metode

Penelitian ini berlokasi di Universitas Negeri Surabaya. Alasan mengapa tempat tersebut dipilih dikarenakan peneliti yang masih melanjutkan studi di lokasi tersebut dan lokasi tersebut adalah lingkungan akademis yang didalamnya terdapat organisasi intra kampus dan subyek utama penelitian yakni mahasiswa yang masih melanjutkan studi di lokasi tersebut. Dan adapun alasan metodologis untuk menentukan Universitas Negeri Surabaya sebagai lokasi penelitian adalah data sekunder yang telah didapat peneliti dan telah dipaparkan pada bab latar belakang penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang masalah yang terjadi misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Kualitatif bersifat lebih mendalam untuk menjelaskan suatu fenomena yang hadir sebagai suatu permasalahan. Kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yaitu penggalian atas sesuatu yang berada di balik peristiwa. Fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomenologi lebih mendeskripsikan tentang pengalaman dan bukan untuk menjelaskan atau menganalisisnya. Deskripsi fenomenologi lebih dekat pada kealamiahannya sehingga dapat mempertahankan fenomena seperti apa adanya. Penelitian ini memilih pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Sebagai peneliti sosial

harus membuat interpretasi terhadap realitas yang diamati. Ketika melakukan penelitian, peneliti harus menggunakan interpretasi yang sama dengan orang yang diamati. Sehingga peneliti bisa masuk ke dalam dunia interpretasi orang yang dijadikan penelitian (Kuswarno, 2009:37).

Subjek dalam penelitian ini yang dipilih dengan cara *purposive*. Informan adalah mahasiswa yang sedang menjabat posisi utama seperti ketua dan wakil pada organisasi intra kampus pada lingkungan tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan pada periode jabatan 2013-2014. Serta informan paham akan situasi, kondisi struktural organisasi intra kampus dan kondisi politik yang ada di dalam organisasi intra kampus.

Dalam penelitian ini peneliti menginventarisir data baik berbentuk sekunder maupun primer. Dalam pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik antara lain Pengamatan berpartisipasi. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik wawancara mendalam. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik wawancara yang dilakukan akan mempermudah peneliti menanyakan berbagai pertanyaan pada subjek penelitian yang telah ditentukan. Peneliti juga menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, untuk menambah data-data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumentasi dan berkas-berkas kepengurusan organisasi kemahasiswaan.

Proses analisis data dari penelitian ini dimulai dari menelaah semua data yang telah diperoleh seperti gambaran-gambaran tentang kejadian-kejadian yang ada dalam penelitian ini secara luas, dokumen, gambar atau foto, data sekunder dan yang paling utama adalah hasil wawancara informan. Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan analisis menurut Miles dan Hubberman dalam Emzir (2012:129-133) *Pertama* peneliti melakukan tahap reduksi data yang merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Data yang telah diperoleh oleh peneliti tidak akan secara “mentah-mentah” langsung dimasukkan, tetapi ada proses pemilihan, data mana yang menjadi fokus penelitian. *Kedua* melakukan pengkategorian yang merupakan proses pengelompokan data-data atau konsep yang telah dianggap berhubungan langsung dengan fenomena

atau penelitian. Maksud dari pengkategorian adalah untuk mempermudah menganalisa data yang nantinya dikaitkan dengan kajian teori yang telah dipaparkan. Pengkategorian ini juga akan menjawab bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang *Ketiga* yaitu penarikan kesimpulan. proses ini adalah proses terakhir analisa data. Setelah pengkategorian yang telah dikaitkan dengan kajian teori yang ada, mulailah terdapat penarikan kesimpulan. Dari permulaan data, peneliti mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur kausal, dan proposisi-proposisi. kesimpulan adalah jawaban atau “benang merah” atas fenomena yang telah diteliti.

Hasil dan Pembahasan

A. Latar Belakang Partisipasi Politik

Dalam partisipasi politik perempuan di ranah organisasi mahasiswa intra kampus memiliki beberapa latar belakang yang berbeda. Terdapat dua bentuk latar belakang mahasiswa berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa intra kampus yaitu Keinginan sendiri dan dukungan. *Pertama* keinginan sendiri adalah motivasi dari mahasiswa perempuan yang ingin aktif di organisasi mahasiswa intra kampus karena riwayat dari mahasiswa perempuan yang berpengalaman dalam bidang organisasi. Selain itu keinginan sendiri dapat ditafsirkan sebagai keinginan karena mahasiswa perempuan melihat kondisi lingkungan kampus dalam hal politis yang tidak kondusif sehingga mengharuskan mahasiswa perempuan tersebut untuk aktif didalamnya. Dari beberapa subyek penelitian menunjukkan latar belakang mahasiswa dalam berpartisipasi politik di dalam organisasi mahasiswa intra kampus karena motivasi untuk berorganisasi yaitu ingin aktif dan riwayat mahasiswa perempuan yang berpengalaman dalam bidang organisasi.

Dukungan di definisikan sebagai bentuk yang didapat oleh mahasiswa perempuan dari lingkungan sekitar untuk maju dan aktif dalam organisasi mahasiswa intra kampus. Dukungan tersebut memiliki berbagai bentuk, ada bentuk dukungan dengan cara paksaan dari lingkungan karena melihat kondisi kampus yang tidak kondusif dan bentuk dukungan yang positif dengan melihat sumber daya mahasiswa perempuan tersebut yang berkompetensi. Selain motivasi keinginan sendiri yang menjadi latar belakang mahasiswa perempuan

yang berpartisipasi secara politik di organisasi mahasiswa intra kampus, ada faktor dukungan. Dukungan di definisikan sebagai bentuk yang didapat oleh mahasiswa perempuan dari lingkungan sekitar untuk maju dan aktif dalam organisasi mahasiswa intra kampus. Bentuk dukungan dengan cara paksaan dari lingkungan karena melihat kondisi kampus yang tidak kondusif. Bentuk dorongan tidak hanya menunjukkan hal yang negatif, tetapi terdapat juga bentuk dukungan yang positif dengan melihat sumber daya mahasiswa perempuan tersebut yang berkompetensi.

Selain itu faktor latar belakang partisipasi perempuan dalam politik organisasi intra kampus berasal dari dukungan atau dorongan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan (kelompok kepentingan). Latar belakang mahasiswa perempuan dalam partisipasi politik juga dilihat dari keinginan sendiri dengan melihat keadaan kampus yang tidak kondusif (mobilisasi).

Partisipasi politik ini menurut Surbakti juga terbagi dalam dua macam. *Pertama* adalah partisipasi yang muncul karena kesadaran diri (*self motion*), dan yang *kedua* adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar desakan, manipulasi, dan paksaan dari pihak lain. Partisipasi sebagai kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif ialah kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang disusun pemerintah sedangkan partisipasi pasif ialah kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah (Surbakti, 1992:141)

Sesuai data diatas partisipasi politik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya memiliki dua macam latar belakang. Yang pertama sesuai dari konsepsi Surbakti yang menjelaskan bahwa partisipasi politik muncul atas kesadaran diri (*selfmotion*) dan juga partisipasi yang dilakukan atas dasar desakan dan dukungan dari mahasiswa lain untuk menjadi pimpinan di organisasi mahasiswa intra kampus. Partisipasi ini juga tergolong dalam kategori partisipasi aktif karena menjadi pimpinan organisasi mahasiswa intra kampus yang memiliki otoritas tertinggi dalam menetapkan dan memutuskan kebijakan organisasi yang dipimpin.

Partisipasi mahasiswa perempuan yang dilatar belakangi oleh faktor dukungan yang menyangkut

dorongan dari pihak-pihak lain sesuai dari konsepsi Philip Altoff dan Michel Rush bahwa partisipasi politik lahir dari dorongan atau mobilisasi dari kelompok-kelompok kepentingan. Setiap pertimbangan dari pemegang jabatan harus mengandung pertimbangan dari orang-prang yang berhasrat dan mencari jabatan kantor yang bersangkutan dari sudut pandang sistem politik, partai politik, dan kelompok kepentingan dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilitas politik, yaitu suatu organisasi, melalui mana anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan gagasan posisi yang meliputi usaha mempertahankan gagasan posisi, situasi, orang atau kelompok-kelompok tertentu lewat sistem yang bersangkutan (Altoff&Rush, 2002:128)

Partisipasi politik ini cenderung dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan. Dari penjelasan beberapa mahasiswa bahwa dalam berpartisipasi politik tidak lepas dari dorongan mahasiswa lain dan dorongan dari pimpinan sebelumnya yang menjabat di organisasi mahasiswa intra kampus. Kelompok kepentingan yang mendukung mahasiswa dalam mencalonkan sebagai pimpinan organisasi kampus salah satunya adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus. Organisasi mahasiswa ekstra kampus ini mempunyai peran dan pengaruh partisipasi politik mahasiswa di organisasi intra kampus. Dukungan dari organisasi mahasiswa ekstra kampus ini dilakukan melalui beberapa mahasiswa yang menjadi kader di jurusan tersebut untuk mensukseskan dalam pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa intra kampus. Bentuk dukungan tersebut tidak secara langsung mengatasnamakan organisasi mahasiswa ekstra, melainkan melalui kedekatan-kedekatan secara personal. Bentuk tersebut disertai wacana untuk menjadikan organisasi mahasiswa intra kampus tersebut menjadi lebih baik. Selain bentuk wacana untuk menjadikan organisasi mahasiswa intra kampus menjadi lebih baik dukungan tersebut berupa isu persaingan antar organisasi mahasiswa ekstra kampus di tingkat jurusan atau prodi dan memunculkan wacana indenpedensi jika mahasiswa tersebut maju menjadi pimpinan organisasi intra kampus. Dukungan ini terjadi di beberapa organisasi mahasiswa intra kampus di beberapa jurusan yang dipimpin oleh mahasiswa.

B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Dalam pembentukan partisipasi politik mahasiswa terbagi dalam 3 tahap yaitu, *pertama* Pra kepemimpinan organisasi intra. Tahap pertama ini menggambarkan partisipasi politik mahasiswa dimulai dari awal masuk menjadi mahasiswa. *Kedua* saat menjadi pimpinan organisasi intra kampus. Tahap kedua ini menggambarkan partisipasi politik mahasiswa saat menjadi pimpinan organisasi intra kampus dan sebagai pengambil keputusan dalam organisasi intra kampus. *Ketiga* pasca kepemimpinan organisasi intra kampus. Tahap terakhir ini menggambarkan partisipasi politik mahasiswa setelah menjadi pimpinan organisasi intra kampus atau sudah tidak aktif lagi (*demisioner*) sampai berakhirnya masa studi menjadi mahasiswa.

1. Pra Kepemimpinan Organisasi

Pada masa ini partisipasi politik dimulai dari awal masuk menjadi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Partisipasi politik subyek terbagi beberapa bentuk yaitu partisipasi dalam rapat umum, keanggotaan pasif di organisasi, keanggotaan aktif di organisasi. Dari bentuk partisipasi politik mahasiswa diatas dalam pra kepemimpinan organisasi intra kampus dapat digolongkan kedalam kategori bentuk partisipasi politik konvensional (Masoed & McAndrew, 2006:47) yaitu bentuk komunikasi individual dengan pejabat politik administrasi. Selain itu bentuk partisipasi politik mahasiswa diatas diatas dalam pra kepemimpinan organisasi intra kampus dapat digolongkan kedalam tipologi partisipasi politik kategori *subyek* sesuai konsepsi Gabriel Almond dalam Mochtar Masoed dan Colin MacAndrew. Menurut Gabriel Almond Subyek, yaitu orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat pemerintah dan undang-undang tetapi tidak melibatkan diri pada politik ataupun memberikan suaranya pada pemilihan (Masoed & McAndrew, 2006 : 42)

2. Saat Menjabat Organisasi

Pada masa ini menggambarkan bentuk partisipasi politik mahasiswa dimulai dari proses pencalonan sampai terpilih menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di Universitas Negeri Surabaya serta kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh

mahasiswa ketika menjabat sebagai ketua HMJ. Partisipasi politik mahasiswa terbagi beberapa bentuk, yaitu kegiatan kampanye, pemberian suara, penentu kebijakan, dan penyelenggara kegiatan (Masoed & McAndrew, 2006:42). Bentuk-bentuk partisipasi politik yang telah terbagi diperkuat oleh beberapa penjelasan dari mahasiswa. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai mediasi demi berjalannya roda organisasi yang sehat. Dari bentuk partisipasi politik mahasiswa di atas dalam pra kepemimpinan organisasi intra kampus dapat digolongkan kedalam kategori bentuk partisipasi politik konvensional (Masoed & McAndrew, 2006 : 47) yaitu Diskusi Politik, Kegiatan Kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Dalam proses pemilihan mahasiswa melakukan tindakan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan yaitu orang-orang yang menginginkan mahasiswa tersebut menjadi calon ketua. Hal tersebut disertai diskusi politik untuk melakukan proses pemenangan dengan cara melakukan kegiatan kampanye. Selain itu bentuk partisipasi politik mahasiswa diatas diatas dapat digolongkan kedalam tipologi partisipasi politik kategori partisipan sesuai konsepsi Gabriel Almond dalam Mochtar Masoed dan Colin MacAndrew (Masoed & McAndrew, 2006:42). Menurut Gabriel Almond partisipan adalah Partisipan, yaitu orang-orang secara aktif berpartisipasi dalam perpolitikan dan mempunyai informasi yang cukup tentang kehidupan politik.

3. Pasca Kepemimpinan Organisasi

Pada masa ini menggambarkan bentuk partisipasi politik mahasiswa setelah menjabat sebagai ketua organisasi intra kampus. Dalam masa ini partisipasi politik mahasiswa tergolong memiliki bentuk yaitu apatis. Bentuk partisipasi politik mahasiswa diatas dapat digolongkan kedalam tipologi partisipasi politik kategori parokial sesuai konsepsi Gabriel Almond dalam Mochtar Masoed dan Colin MacAndrew (Masoed & McAndrew, 2006:42). Menurut Gabriel Almond parokial adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik.

Dalam 3 tahap yang telah dijelaskan diatas yaitu, *pertama* Pra kepemimpinan Organisasi intra. *Kedua* saat menjadi pimpinan organisasi intra kampus. *Ketiga* pasca kepemimpinan organisasi intra kampus dapat digolongkan dalam suatu hierarki partisipasi politik. Hierarki yang paling

sederhana dan paling berarti ialah hierarki atas taraf atau luas partisipasi politik. Hierarki yang dimaksudkan dalam tabel tersebut adalah untuk mencakup seluruh jajaran partisipasi politik dan untuk dapat diterapkan pada semua tipe partisipasi politik. Arti berbagai tingkat ini tentunya mungkin berbeda satu sistem politik dengan yang lain, dan tingkatan-tingkatan khusus menyebabkan dampak besar pada suatu sistem, dan akibat kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun pada sistem khususnya (Altoff&Rush,2002:123)

Penutup

Simpulan

Peran dan partisipasi politik mahasiswi dalam organisasi intra kampus sudah mulai mengemuka. Di Unesa misalnya, pada jajaran struktural organisasi intra kampus sudah ada mahasiswi yang namanya tercantum pada posisi inti. Meskipun dari segi presentase masih kalah bila dibandingkan dengan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Peranan mahasiswi dalam dinamika gerakan perempuan dapat dilihat dari peran aktif mahasiswi di dalam organisasi terutama organisasi perempuan. Partisipasi mahasiswi dalam praktik politik kampus menjadi penting karena mahasiswi adalah sumber daya yang sangat potensial bagi gerakan perempuan. Mahasiswi adalah calon-calon tokoh profesional dan intelektual. Selain itu mahasiswi dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru dari sudut pandang yang berbeda dan mahasiswi dapat dijadikan sebagai aktor utama dalam menarik suatu massa politik.

Dari beberapa tahun terakhir, eksistensi mahasiswi ke ranah politik dengan ditunjukkan dengan keaktifan mahasiswi menjadi anggota organisasi intra kampus yang meliputi lingkungan tertinggi Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas dan Fakultas sampai pada tingkatan terendah yaitu Himpunan Mahasiswa di tingkat Jurusan atau Prodi. Bermula hanya sekedar menjadi anggota mahasiswi tersebut mencapai pada tingkat posisi tertinggi menjadi ketua organisasi intra kampus. Motif yang melatarbelakangi mahasiswi tersebut untuk berpartisipasi politik di kampus adalah :

1. Mahasiswi mempunyai latar belakang sebagai seorang organisatoris, yaitu pengalaman organisasi yang telah diikuti oleh mahasiswi sebelum memasuki perguruan

tinggi dan ingin melanjutkan keaktifan dalam hal kegiatan ketika memasuki perguruan tinggi. Tak sedikit para mahasiswi pernah menjadi ketua di organisasinya pada saat menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas sehingga para mahasiswi ingin melanjutkan karir organisasi di perguruan tinggi.

2. Motif partisipasi politik mahasiswi dalam hal ini menjadi ketua organisasi karena mahasiswi melihat kondisi internal di organisasi tidak stabil dan melihat dinamika politik kampus yang tidak stabil dapat mempengaruhi kondisi internal organisasi intra kampus, khususnya organisasi intra kampus yang berada di lingkup jurusan atau prodi.
3. Motif dalam bentuk dukungan. Dukungan di definisikan sebagai bentuk yang didapat oleh mahasiswi dari lingkungan sekitar untuk maju dan aktif dalam organisasi mahasiswa intra kampus. Dukungan tersebut memiliki berbagai bentuk, ada bentuk dukungan dengan cara paksaan dari lingkungan karena melihat kondisi kampus yang tidak kondusif dan bentuk dukungan yang positif dengan melihat sumber daya mahasiswi tersebut yang berkompetensi. partisipasi perempuan dalam politik organisasi intra kampus berasal dari dukungan atau dorongan (mobilisasi) dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan (kelompok kepentingan).

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dalam prosesnya mahasiswi tersebut memiliki cara tersendiri dan memiliki bentuk sendiri dalam menentukan partisipasi politik yang mereka lakukan, dalam hal ini mahasiswi menjadi dan berproses menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Prodi sampai pasca menjabat sebagai ketua. Bentuk-bentuk tersebut terbagi dalam berbagai masa, yaitu : *pertama* Pra kepemimpinan Organisasi intra. Tahap pertama ini menggambarkan partisipasi politik mahasiswi dimulai dari awal masuk menjadi mahasiswi. Partisipasi politik terbagi beberapa bentuk yaitu partisipasi dalam rapat umum, keanggotaan pasif di organisasi, keanggotaan aktif di organisasi. *Kedua* saat menjadi pimpinan organisasi intra kampus. Tahap kedua ini menggambarkan partisipasi politik mahasiswi saat menjadi pimpinan organisasi intra kampus dan sebagai pengambil keputusan dalam organisasi intra kampus. Partisipasi politik

mahasiswi dimulai dari proses pencalonan sampai terpilih menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di Universitas Negeri Surabaya serta kegiatan-kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh mahasiswi ketika menjabat sebagai ketua HMJ. *Ketiga* pasca kepemimpinan organisasi intra kampus. Tahap terakhir ini menggambarkan partisipasi politik mahasiswi setelah menjadi pimpinan organisasi intra kampus atau sudah tidak aktif lagi (*demisioner*) sampai berakhirnya masa studi menjadi mahasiswi. Partisipasi politik mahasiswi setelah menjabat sebagai ketua organisasi intra kampus. Dalam masa ini partisipasi politik mahasiswi tergolong memiliki bentuk yaitu apatis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik merupakan suatu dasar dalam kehidupan politik yang ada di kehidupan manusia, tidak hanya kaum laki-laki tetapi partisipasi politik juga berhak didapatkan oleh kaum perempuan. Partisipasi politik yang berimbang antara laki-laki dan perempuan akan menciptakan proses demokrasi dan kondisi politik yang lebih baik. Dan perempuan harus lebih impresif dan lebih aktif dalam semua hal, khususnya dalam hal partisipasi politik. pengaplikasian partisipasi politik yang ditunjukkan mahasiswi sebagai agen perubahan harus lebih terlihat nyata, bukan hanya sebagai penarik massa politik tetapi dapat menentukan kebijakan.
2. Semua pihak harus memulai membuka pandangan mereka tentang kehidupan perempuan dan memberikan kesempatan yang lebih bagi perempuan untuk mengaplikasikan kegiatan politik. Diskriminasi jenis kelamin dalam hal apapun, khususnya dalam hal partisipasi politik harus dihapuskan demi menjalankan sistem demokrasi yang lebih baik. Universitas adalah wadah bagi semua golongan untuk berproses dalam hal yang bersifat akademis dan politik karena mahasiswa adalah agen perubahan, sehingga kampus harus mampu menciptakan kondisi dan iklim politik tanpa ada diskriminasi jenis kelamin dalam hal berproses pembelajaran politik.
3. Peneliti menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini. peneliti mengharapkan

kepada peneliti selanjutnya dengan tema yang sama untuk membenahi kekurangan yang telah peneliti lakukan sehingga tercipta penelitian yang lebih sempurna.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. 1997. "Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi" dalam Mochtar Masoed dan Colin MacAndrew. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Althoff, Philip Michael Rush. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Diamitra, Roby. 2012. "Partisipasi Politik Masyarakat Samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro". *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Farida, Anik. 2006. "Partisipasi Politik Perempuan Pesantren di DPRD Jombang: Studi Kualitatif Deskriptif Partisipasi Politik Perempuan Pesantren yang Menjadi Anggota dan Calon Anggota DPRD Tingkat II di Jombang". *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Hani, Rizky. 2013. "Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Dalam Pemilu Tahun 2009: Studi Kasus Desa Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang". *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Mansour, Fakhri. 1998. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi: Konsep, Pedoman, Dan Contoh Penelitiannya*. Padjadjaran: Widya Padjadjaran
- Miles, Matthew B. And Huberman, A. Michael. 1984. *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publications
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif : ANALISIS DATA*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*.
Jakarta : Gramedia Widia Sarana
Indonesia

Wijaksana, MB. 2004. "*Modul Perempuan Untuk
Politik : Sebuah Panduan Tentang
Partisipasi Perempuan Dalam Politik*".
Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan

Yayasan Jurnal Perempuan no.15 Tahun 2001.

